

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
HIBAH OLEH AHLI WARIS
(STUDI KASUS DI DESA SUMOKEMBANGSRI KECAMATAN
BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah	
PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 119 AS	No. REG : S.2012/AS/119 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

AGUS HARIYANTO
NIM : C01205106

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2012**

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN OTENTITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agus Hariyanto

NIM : C01205106

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

Alamat : Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS DI DESA SUMOKEMBANGSRI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO)” adalah hasil karya dan bukan plagiat.

Demikian surat ini dibuat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, 07 Agustus 2012

METERAI
TEMPEL
PAJAK KEHARUKUN BANGSA
1000



9E98BAAF916886453

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Agus hariyanto

C01205106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Agus Hariyanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.
NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Agus Hariyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 september 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



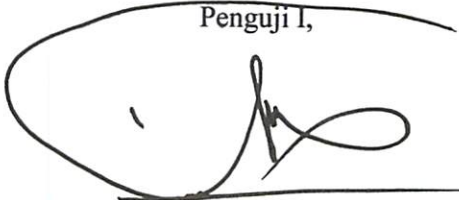
Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.
NIP: 196506151991021001

Sekretaris,



Ita. Musarrofa, SHL., M.Ag.
NIP: 197908012011012003

Penguji I,



Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,



Dr. Sri Wijayati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.
NIP: 196506151991021001

Surabaya, 24 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

- a. Interview, observasi, dan dokumenter adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang penarikan kembali hibah.
4. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan didalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analitis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tentang penarikan kembali hibah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Bab Ketiga Membahas tentang keadaan masyarakat Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan penarikan kembali hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat Membahas tentang analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan kesimpulan terperinci dari bahasan bab sebelumnya.

Bab Kelima merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

3. Madzhab Maliki, hibah adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan / ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*mauhub lah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridla Allah dan mengharapkan dapat pahala-Nya mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
4. Mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian: Pertama, *Pengertian khusus*, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas. *Kedua, Pengertian umum*, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan *sadaqah*.¹¹

Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridla Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan *hibah*.

¹¹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah qabda yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokoknya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan, maka dianggap sah tetapi kaharusan serah terima, seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah di adakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ketangan penerima hibah. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah.

E. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang di berikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah:

keasempatan kedua menerimanya sebelum orang yang diberi pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.

3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan membawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.
4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.

dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau puteranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang

Dalam hal ini proses pemberian hibah yang terjadi di Desa Sumokembangsri sudah memenuhi syarat dan rukun hibah yang sudah ada dalam Hukum Islam, inisiatif si pemberi memberikan hibah itu juga karena keinginannya sendiri dan mempunyai tujuan yang baik.

Barang yang telah diberikan juga sah milik sepenuhnya si pemberi hibah yang diperoleh selama pernikahannya dengan suaminya, bukanlah harta peninggalan dari orang tua si pemberi. Sudah barang tentu bahwa hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali oleh siapa pun.

Penarikan hibah oleh ahli waris yang terjadi di Desa Sumokembangsari jelaslah tidak boleh, ini disebabkan barang yang telah di hibahkan milik seutuhnya dari si pemberi tidak tercampur dengan barang milik orang lain (ahli waris).

Diatas sudah dijelaskan, siapa pun tidak boleh menarik kembali hibah yang sudah diberikan. Jangankan orang lain, bahkan orang tua pun tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada anaknya apabila terjadi beberapa perkara.

Kalau dilihat dari pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Penarikan hibah oleh ahli waris yang terjadi di Desa Sumokembangsri ini tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada dalam KHI.

